

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah. Sesuai dengan undang-undang dasar Negara kesatuan republic Indonesia tahun 1945. **Akuntabilitas** Adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic (KK, SAP, 2005), Akuntabilitas itu bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja **sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat.**

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantiya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau biasa disebut good governance dalam suatu Negara merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini (Lembaga Administrasi Negara & Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000) .

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan instruksi presiden republic Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam insruksi presiden (inpres) ini, seluruh instransi pemerintah diwajibkan membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang dibuat berdasarkan system akuntabilitas sistem kinerja instansi pemerintah (sakip). Namun sayangnya pengeluaran inpres tersebut tidak langsung dibarengi dengan reformasi peraturan undang-undangnya Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) ini, seluruh instansi pemerintah diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun sayangnya pengeluaran Inpres tersebut tidak langsung dibarengi dengan reformasi peraturan dan perundang-undangan tentang keuangan Negara sehingga membuat

Lakip menjadi suatu dokumen yang terpisah dengan sector keunagn Negara kemuadian pemerintah mengeluarkan tiga buah undang-undang republic Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang-undang republic Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, dan undang-undang republic Indonesia no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dengan dikeluarkannya ketiga undang-undang tersebut, akuntabilitas dapat dilihat dari dua segi bagian, yaitu segi keuangan dan segi kinerja. Namun kedua jenis kinerja tersebut sering berjalan sendiri-sendiri, walaupun pemerintah telah mencoba membuat aturan agar kedua akuntabilitas tersebut dapat dihubungkan. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah anggaran berbasis kinerja , membentuk tim studi pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan mengeluarkan peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengambil judul **“PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.**

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan sistem akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ?

1.3. Tujuan Penulis

Mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

1.4. Metode Penelitian

Dalam data ini jenis data yang digunakan data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan mengambil dan mengkaji teori-teori yang relevan dalam permasalahan yang dibahas pada karya tulis ini berupa, tinjauan, tesis /ringkasan dan kepustakaan.

Ruang lingkup studi pustaka ini adalah mencakup kegiatan-kegiatan seperti mencari, mempelajari, dan menganalisa literatur-literatur yang relevan. jenis data yang digunakan penulis merupakan data sekunder. Data sekunder berupa Bukti, Catatan, atau Laporan Historis yang telah disusun dalam Arsip (Data Documenter yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan). Data sekunder ini meliputi Literature Perpustakaan, Internet, serta sumber-sumber data sekunder lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar laporan Studi yang disajikan oleh penulis lebih terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan magang yang terdiri dari 5(lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam sebuah bab ini menguraikan tentang mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan yang dilakukan kegiatan magang, manfaat dilakukan kegiatan magang, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan pengertian dan penerapan dari konsep akuntabilitas, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas terhadap undang-undang, reformasi akuntabilitas keuangan, laporan keuangan, laporan keuangan pemerintah, standar akuntansi pemerintah, pertanggung jawaban Keuangan Negara.

BAB III GAMBARAN UMUM BPKAD KOTA PADANG

Menjelaskan tentang profil BPKAD KOTA PADANG yang berisi penjelasan mengenai sejarah BPKAD Kota Padang; kegiatan utama BPKAD KOTA PADANG, visi dan misi yang ditawarkan serta produk atau jasa BPKAD KOTA PADANG; dan struktur organisasi pada organisasi tempat magang.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi penjelasan tentang informasi yang diperoleh selama kegiatan magang yang telah dilakukan, dan

berlangsung baik itu merupakan informasi secara, Kualitatif, Kuantitatif maupun Statistic.

BAB V BAB PENUTUB

Bab ini menyajikan gambaran pembahasan laporan yang telah disajikan dalam kesimpulan dan saran-saran. Saran yang diberikan berguna dalam perbaikan dimasa yang akan datang baik itu bagi, instansi pemerintah terkait kampus, penulis maupun pembaca .



